



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
UNIT KERJA : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS WIBOWO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 427116

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.390.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/100 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
2. Tanah Seluas 90 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. Tanah Seluas 2537 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 355.000.000
4. Tanah Seluas 90 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
5. Tanah Seluas 251 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, WARISAN Rp. 130.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 123 m2/60 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, LAINNYA Rp. 340.000.000
7. Tanah Seluas 3020 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 295.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 177.500.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA FIT Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
3. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 167.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 21.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	423.399.987
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.011.899.987
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.011.899.987

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.